



Peran Kepala Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Darmorpi Darfuar Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor

Iswahyudi ¹, Agustina ², Asmadiano ³, Edyanto ^{4*}

¹ Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

^{2,3,4} Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak, Indonesia.

Penulis Korespondensi; dewa2407.iisip@gmail.com *

Abstract. *This study aims to analyze the role of village heads in improving development in Darmorpi Village, Samofa District, Biak Numfor Regency. Village administration, as the spearhead of government administration, plays an important role in realizing public services, community empowerment, and sustainable development. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The results show that the village head plays a strategic role in leading and mobilizing all elements of society, including traditional leaders, religious leaders, village officials, and the general public, to actively participate in development. The village head's leadership emphasizes not only administrative aspects but also service, motivation, work discipline, and capacity building for village officials. The synergy between leadership and community participation proved to be a key factor in the success of the development program in Darmorpi Village. However, this study also found obstacles in the form of a lack of coordination regarding the implementation of assistance programs from the local government, which had an impact on the community's perception of the effectiveness of development. Thus, it can be concluded that the success of village development is largely determined by the visionary leadership of the village head and the collective support of the community.*

Keywords: *Leadership, Village Development, Community Participation, Biak Numfor.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Darmorpi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Pemerintahan kampung sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan memiliki peranan penting dalam mewujudkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki peran strategis dalam memimpin dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, aparat kampung, maupun masyarakat umum, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kepemimpinan kepala kampung tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mengedepankan pelayanan, motivasi, disiplin kerja, serta peningkatan kapasitas aparat kampung. Sinergi antara kepemimpinan dan partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan di Kampung Darmorpi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala berupa kurangnya koordinasi terkait implementasi program bantuan dari pemerintah daerah, yang berdampak pada persepsi masyarakat mengenai efektivitas pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan kampung sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala kampung yang visioner dan dukungan kolektif masyarakat.

Kata kunci: Kepemimpinan, Pembangunan Kampung, Partisipasi Masyarakat, Biak Numfor.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan kampung merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, karena organisasi adalah wadah untuk mencapai tujuan yang di inginkan oleh organisasi tersebut oleh karena bermacam tujuan yang di maksud, di perlukan pula macam macam bagian dan bentuk pelayanan sebagai relasi pelaksanaan tugas – tugas pokok aparat kampung demi pencapaian tujuan kampung, Landasan pemikiran ini dalam pengaturan mengenai

Pemerintahan kampung adalah keanekaragaman, Adat istiadat, partisipasi masyarakat, Otonomi asli Daerah, Demokrasi dan Pemberdayaan masyarakat, sehingga perangkat atau Aparat Kampung lebih melihat kepada kepentingan masyarakat dari pada kepentingan diri sendiri karena Pada masa era reformasi Pemerintahan kampung diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004.

Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk kampung seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, kampung atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. kampung dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal- usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah kampung dan juga masyarakat kampung. Pemerintahan kampung atau dalam bentuk nama lain, seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah, berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan (Cece Sobarna, Taufik Ampera, 2021). Pelaksanaan otonomisasi kampung yang bercirikan pelayanan yang baik adalah, dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang kampung tersebut (Suarsih et al., 2017).

Posisi Pemerintahan kampung yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah kampung selaku pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampung, apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan akan diapresiasi oleh masyarakat Kampung Darmorpis, sebaliknya jika pelayanan yang diberikan oleh aparat kampung terhadap masyarakat kurang berkualitas maka akan dipersipikan buruk, dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Aparat Kampung dalam memenuhi harapan masyarakat secara konsisten, Pemerintah kampung selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan. dan bidang Pembangunan, pemerintah kampung

juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala kampung dan perangkat kampung berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini.

Pemerintah kampung turut serta dalam membina masyarakat kampung, seperti yang kita ketahui Pemerintah kampung mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang – undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, Kampung pasti juga memiliki aparat yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan Kampung supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib Ketertiban adalah, suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Namun nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial warga masyarakat itu kelihatan sudah mulai pudar, jika tidak boleh disebut akan punah dengan sendirinya. Persoalannya adalah bagaimana Kesetiakawanan Sosial 3 (nilai-nilai) itu digali kembali dalam konteks masyarakat pluralis dan realitas perubahan seperti saat ini. ini memang bukan pekerjaan mudah, namun kiranya kita mencoba mengeksplor nilai-nilai sosial tersebut yang mungkin mendasar kepada Kemasyarakatan Sosial berdasarkan pengalaman- pengalaman praktis ketika menangani suatu Problem Sosial yang terjadi di masyarakat bisa di selesaikan dengan baik dan benar, sehingga apa yang di harapkan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Kampung dalam arti perangkat atau aparat kampung bisa terwujud dengan baik sehingga masyarakat lebih merasa puas dengan apa yang di terapkan oleh pemerintah kampung menyangkut nilai nilai sosial, budaya dan politik pudar dan hilang Secara khusus di kampung Darmorpi. Selanjutnya, hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat (Virgie Delawillia Kharisma, Anwar, 2013). Selanjutnya, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju (Makmur, 2020). Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya (Hidayat & Djadjuli, 2020). Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Mustanir & Darmiah, 2016).

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota (Fransisca Winarni, 2016). Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Uamang et al., 2018).

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Dari uraian diatas nampak jelas bahwa Peran Kepala kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan mutu kerja untuk mencapai tujuan masyarakat dan Aparat Kampung Darmorpis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kampung Darmorpis Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan maksud untuk menemukan fenomena atau kejadian yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini berhubungan langsung dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Kualitatif, maka pengumpulan data ini tidak di adu langsung oleh teori tetapi dapat langsung dengan Fakta atau kejadian nyata yang sudah ditemukan langsung pada tempat penelitian. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan oleh peneliti bersifat induktif ata bersifat berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, dan kemudian dikonstruksikan pada teori. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis penelitian untuk melakukan penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data analisis dilakukan dengan teknik analisis Deskriptif dan kualitatif yakni analisis data dalam uraian atau gambaran. Analisis model interaktif adalah Analisis data melalui (3) kegiatan yang terjadi bersamaan Reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan masing-masing.

3. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah kampung terhadap pembangunan kampung pada kampong darmorpis darfuar distrik samofa kabupaten biak numfor, khusus pemeerirntah Kampung Darmorpis Distrik Samofa yang diperoleh dari Hasil wawancara, dengan kepala kampong beserta Aparatnya.

Peran Kepala Kampung Dalam Meningkatkan pembangunan Kampung Darmorpis Darfuar.

Peran pemerintah kampung adalah untuk memberikan suatu perubahan dari berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung yang baik sehingga perlu adanya kerja sama atas semua pihak baik organisasi, kelompok sehingga segala upaya yang di inginkan dapat terwujud dalam masyarakat. Kepemimpinan adalah suatu bentuk kegiatan dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama kearah yang lebih baik. Demikian halnya pada Kampung Darmorpis Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai suatu lembaga organisasi pemerintahan yang memiliki suatu tujuan yang jelas, untuk itu di perlukan adanya upaya dari setiap unsur yang ada didalamnya secara maksimal, terutama pada unsur pemimpin, sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud. Untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang baik yang mampu menjalankan kepemimpinan secara terarah dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sergius Sroyer, mengemukakan bahwa;

“Selaku kepala Kampung Darmorpis mengatakan bahwa : “Dalam menjalankan roda pemerintahan terkecil pada kampung Darmorpis perlu adanya kerja sama di antara semua pihak baik masyarakat, adat, gereja maupun aparat kampung, untuk bersama-sama mendukung program pembangunan yang selama ini sedang berjalan, sebab tanpa adanya kerja sama yang baik maka proses pembangunan tentu akan terhambat dan efeknya akan berimbas pada masyarakat oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh masyarakat sehingga program pembangunan yang di jalankan dapat tercapai secara efektif dan efisien guna dapat mengubah keadaan kampung menjadi lebih baik. (Hasil wawancara tanggal 06 april 2025).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lukas Simson Sroyer Selaku Ketua Bamuskam Kampung Darmorpis, mengemukakan bahwa;

“ Peran yang di lakukan oleh kepala kampung Darmorpis sangat baik dalam menjalankan roda pemerintahan nya baik berupa bimbingan, arahan, motivasi, dukungan materil dan moril agar dapat di mengerti dengan baik sehingga mampu menjalankan tugas-tugas yang di berikan, serta selalu mengutamakan tugas nya sebagai pelayan masyarakat sehingga seluruh aktifitas kerja dalam hal pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. (hasil wawancara tanggal 07 april 2025).

Hasil wawancara dengan Yohana Arwam Selaku Masyarakat kampung, Mengatakan bahwa :

“ disiplin kerja Kepala Kampung Darmorpis selama ini cukup baik dalam memberikan pelatihan kerja terhadap aparatnya sehingga hal ini menjadi suatu pengetahuan baru untuk lebih giat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala kampung dalam hal mengatur administrasi kampung sesuai bidang kerjanya masing-masing serta urusan-urusan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan kampung.(Hasil wawancara tanggal 13 april 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Kampung Darmorpis, terlihat bahwa kepemimpinan kepala kampung memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan kampung. Kepala Kampung Darmorpis, Sergius Sroyer, menegaskan bahwa pembangunan di tingkat kampung hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh elemen masyarakat terlibat, termasuk tokoh adat, gereja, aparat kampung, dan masyarakat luas. Tanpa adanya kerja sama yang baik, pembangunan akan terhambat dan pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung menekankan pentingnya partisipasi kolektif agar program pembangunan yang dijalankan dapat tercapai secara efektif dan efisien untuk mewujudkan perubahan positif bagi kampung. Kepemimpinan Kepala Kampung Darmorpis memiliki kontribusi signifikan dalam membangun sinergi antara aparat kampung, tokoh masyarakat, gereja, adat, dan masyarakat luas. Kepemimpinan yang ditunjukkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan aspek pelayanan, motivasi, disiplin, serta peningkatan kapasitas aparat kampung. Sinergi antara kepemimpinan kepala kampung dengan dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kampung Darmorpis. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di tingkat kampung tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kepala kampung, tetapi juga oleh partisipasi kolektif masyarakat yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Peran Kepala kampung Darmorpis Dalam Meningkatkan pembangunan Kampung dan fungsi kerja dalam hal pelayanan di kampung Darmorpis sangat baik, dan ini berarti bahwa aparat pemerintah kampung Darmorpis sudah dikatakan cukup baik. Salah satu faktor yang menjadi penghambat proses pembangunan kampung adalah faktor pendidikan dalam hal ini mengenai program bantuan pemerintah propinsi, kabupaten/ kota yang

diturunkan kekampung kurangnya koordinasi yang baik sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan demikian muncul isu atau pendapat yang berbeda-beda terhadap masyarakat bahwa “Kurang adanya perhatian pemerintah artinya program tersebut tidak di control atau diadakan pengecekan kembali apakah program tersebut sudah sampai dan sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cece Sobarna, Taufik Ampera, A. S. A. (2021). Pembangunan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Cilangcang, Kecamatan Cikijing, Majalengka. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 10(3), 267. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i3.31068>
- Fransisca Winarni, P. Y. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Natapraja*, 4(1), 49-64.
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277-293. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>
<https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12614>
<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i3.31068>
<https://doi.org/10.24198/jsk.v2i4.12500>
- Makmur, M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(2), 32-39.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225-238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Suarsih, S., Sunjaya, D. K., Setiawati, E. P., Wiwaha, G., Herawati, D. M., & Rinawan, F. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 2(4), 211-217. <https://doi.org/10.24198/jsk.v2i4.12500>
- Uamang, A., Indra, C., & Sasmito, C. (2018). Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017). *Reformasi*, 8(1), 47-57.
- Virgie Delawillia Kharisma, Anwar, S. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 94-103.